Pembangunan Berkelanjutan

di Kabupaten Garut

STUDI PEMETAAN INISIATIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs)

DI KABUPATEN GARUT

Stock-Taking Kontribusi Aktor Non-Pemerintah dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Kajian Desk Review / Studi Pustaka — 2026

Ringkasan Eksekutif

Kajian ini disusun sebagai upaya awal untuk memetakan (stock-taking) inisiatif pembangunan berkelanjutan yang dijalankan oleh aktor-aktor non-pemerintah di Kabupaten Garut, meliputi komunitas, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perusahaan, universitas, dan masyarakat umum. Pemetaan ini penting karena pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah, melainkan memerlukan kemitraan multipihak sebagaimana diamanatkan pada Tujuan 17 SDGs tentang kemitraan untuk mencapai tujuan.

Kajian disusun menggunakan metode studi pustaka (desk review) dengan menelaah dokumen kebijakan daerah, publikasi akademik, laporan lembaga pemerintah, serta pemberitaan media mengenai program-program keberlanjutan yang berjalan di Kabupaten Garut. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa kontribusi aktor non-pemerintah di Garut sudah cukup beragam, namun sebagian besar masih terfragmentasi, belum terdokumentasi secara terpadu, dan belum sepenuhnya dipetakan keterkaitannya dengan target-target SDGs secara eksplisit.

Kajian ini merekomendasikan penyusunan basis data terpadu kontribusi non-pemerintah, penguatan forum kemitraan multipihak, serta pengintegrasian hasil pemetaan ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan laporan pemantauan SDGs tingkat kabupaten.

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Agenda Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan kesepakatan pembangunan global yang memuat 17 tujuan dengan 169 target indikator yang saling terintegrasi, disepakati oleh 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa termasuk Indonesia. Di tingkat nasional, Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs Indonesia periode 2021–2024 mencatat ketercapaian sekitar 62 persen dari indikator yang ditetapkan, dengan capaian yang tidak merata antar pilar pembangunan dan antar wilayah.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri telah menyusun Voluntary Local Review (VLR) sebagai laporan evaluasi kemajuan pencapaian SDGs di tingkat provinsi, yang antara lain menyoroti perlunya kolaborasi pemerintah dan pemangku kepentingan pembangunan dalam merumuskan prioritas yang relevan dan dapat ditindaklanjuti di tingkat lokal. Semangat ini sejalan dengan pandangan berbagai kajian akademik bahwa pencapaian SDGs pada skala lokal memerlukan inovasi transdisipliner yang melibatkan aktor lintas sektor, bukan semata-mata mengandalkan instrumen kebijakan pemerintah.

Kabupaten Garut, sebagai daerah dengan karakteristik agro-ekologi, kawasan pegunungan, dan sentra ekonomi berbasis pertanian serta pariwisata, memiliki visi pembangunan yang menekankan kemandirian ekonomi masyarakat, pemerataan infrastruktur, serta kelestarian sumber daya alam. Visi tersebut secara substansial beririsan dengan berbagai target SDGs. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Garut juga telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), yang menegaskan pentingnya kontribusi sektor swasta dalam pembangunan berkelanjutan daerah.

Namun demikian, kontribusi aktor non-pemerintah — mulai dari program CSR perusahaan, kegiatan LSM, riset dan pengabdian universitas, hingga inisiatif komunitas dan masyarakat — pada umumnya berjalan secara tersebar dan belum terdokumentasi secara sistematis dalam satu kerangka pemetaan yang mengaitkannya dengan target-target SDGs. Kondisi ini melatarbelakangi perlunya sebuah studi pemetaan (stock-taking) yang dapat menjadi rujukan awal bagi penyusunan basis data kontribusi non-pemerintah di Kabupaten Garut.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana ragam inisiatif pembangunan berkelanjutan yang telah dijalankan oleh aktor non-pemerintah (komunitas, LSM, perusahaan, universitas, dan masyarakat) di Kabupaten Garut?
2. Bagaimana keterkaitan inisiatif tersebut dengan target-target SDGs?
3. Apa peluang dan tantangan dalam mendokumentasikan serta menguatkan kontribusi aktor non-pemerintah tersebut?

1.3 Tujuan Kajian

- Mengidentifikasi dan mendokumentasikan inisiatif pembangunan berkelanjutan yang dilakukan aktor non-pemerintah di Kabupaten Garut berdasarkan studi pustaka.
- Memetakan keterkaitan inisiatif tersebut dengan tujuan dan target SDGs yang relevan.

- Merumuskan rekomendasi awal bagi penguatan kolaborasi multipihak dan pendokumentasian kontribusi non-pemerintah secara berkelanjutan.

1.4 Manfaat Kajian

Kajian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan rujukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun basis data kemitraan pembangunan, bagi organisasi non-pemerintah dan perusahaan dalam memposisikan kontribusinya dalam kerangka SDGs, serta bagi akademisi dan pemerhati pembangunan daerah sebagai titik awal penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan partisipatif.

1.5 Metodologi

Kajian disusun dengan pendekatan kualitatif melalui metode studi pustaka (desk review/literature study) yang bersumber dari internet, meliputi: (1) dokumen kebijakan resmi pemerintah pusat dan daerah; (2) publikasi ilmiah dan jurnal akademik terkait SDGs dan pembangunan di Kabupaten Garut; (3) laporan lembaga seperti Badan Pusat Statistik dan Bappenas; serta (4) pemberitaan media massa mengenai program CSR, kegiatan komunitas, dan inisiatif akademik yang relevan. Data yang terkumpul kemudian disintesis secara tematik dan dipetakan ke dalam kerangka 17 tujuan SDGs.

Pendekatan stock-taking dalam kajian ini merujuk pada praktik umum dalam studi pembangunan, yaitu proses inventarisasi dan dokumentasi sistematis atas kegiatan, program, atau inisiatif yang sudah berjalan di suatu wilayah sebelum dilakukan analisis lebih lanjut atau perumusan kebijakan. Pendekatan ini lazim digunakan sebagai langkah awal sebelum penyusunan basis data pemantauan atau laporan evaluasi seperti Voluntary Local Review.

BAB II Kerangka Konseptual

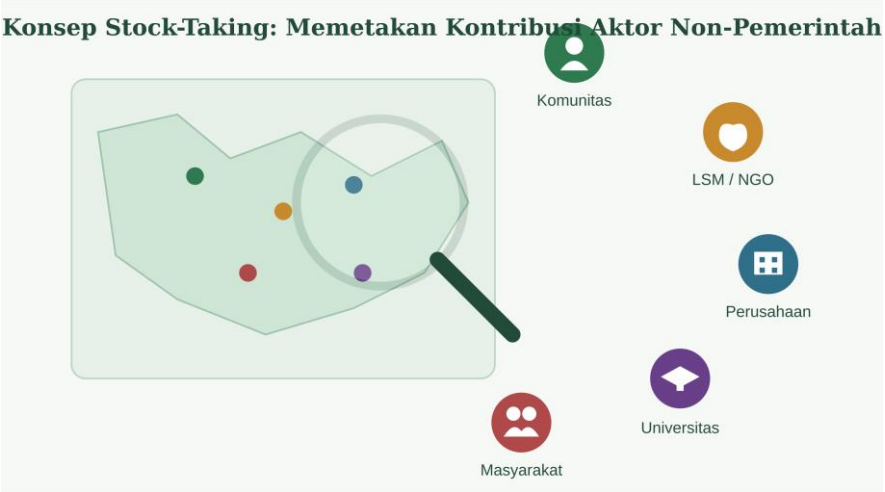

Ilustrasi 1. Konsep stock-taking sebagai proses pemetaan kontribusi lintas aktor (ilustrasi orisinal)

2.1 SDGs dan Kemitraan Multipihak

SDGs terdiri atas 17 tujuan yang saling terintegrasi, mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, dengan prinsip universal, inklusif, dan tidak meninggalkan siapa pun (no one left behind). Tujuan ke-17 secara khusus menegaskan pentingnya kemitraan (partnership) sebagai sarana pelaksanaan (means of implementation), yang mencakup kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat itu sendiri.

Lembaga pemeriksa keuangan negara turut menegaskan pentingnya penilaian atas keterlibatan berbagai pemangku kepentingan sebagai salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan SDGs di suatu wilayah, sehingga pemetaan kontribusi aktor non-pemerintah menjadi bagian integral dari akuntabilitas pembangunan berkelanjutan, bukan sekadar pelengkap laporan pemerintah.

2.2 Peran Aktor Non-Pemerintah

a. Komunitas dan Masyarakat

Komunitas dan kelompok masyarakat berperan sebagai pelaksana inisiatif berskala kecil-menengah yang bersifat langsung menyentuh kebutuhan warga, misalnya melalui bank sampah, kelompok tani, gerakan konservasi lingkungan, maupun forum musyawarah desa. Inisiatif berbasis komunitas umumnya tumbuh dari kebutuhan lokal dan memperkuat kapasitas adaptif masyarakat terhadap perubahan sosial dan lingkungan.

b. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO)

LSM umumnya berperan dalam advokasi kebijakan, pendampingan kelompok rentan, serta penguatan kapasitas masyarakat sipil. Salah satu contoh yang teridentifikasi di Kabupaten Garut adalah keberadaan organisasi tani yang melakukan pemetaan lahan garapan menggunakan sistem informasi geografis, sebagai bentuk advokasi atas hak dan kepastian pengelolaan lahan bagi petani penggarap.

c. Perusahaan (CSR/TJSLP)

Kontribusi sektor swasta pada umumnya disalurkan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP/CSR), yang di Kabupaten Garut telah diatur secara khusus melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2025. Beberapa contoh yang teridentifikasi antara lain penggunaan dana CSR untuk pemenuhan kebutuhan air bersih oleh badan penanggulangan bencana daerah, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis peternakan domba lokal oleh perusahaan energi yang beroperasi di kawasan Garut.

d. Universitas dan Akademisi

Perguruan tinggi berkontribusi melalui penelitian terapan, pengabdian kepada masyarakat, dan penyediaan basis pengetahuan bagi perumusan kebijakan daerah. Sejumlah kajian akademik yang ditelusuri menunjukkan penerapan sistem informasi geografis untuk pemetaan infrastruktur dan data kesejahteraan sosial di Kabupaten Garut, yang berpotensi menjadi rujukan teknis bagi pemerintah daerah dalam perencanaan berbasis data.

e. Masyarakat Umum

Masyarakat sebagai penerima manfaat sekaligus pelaku pembangunan turut berkontribusi melalui partisipasi dalam forum perencanaan desa, kegiatan gotong royong, maupun pelaporan kondisi lingkungan dan sosial melalui kanal partisipatif yang disediakan pemerintah daerah maupun pihak ketiga.

2.3 Kerangka Pemetaan yang Digunakan

Kajian ini mengadaptasi kerangka pemetaan sederhana yang mengaitkan tiga unsur: (1) jenis aktor non-pemerintah; (2) bentuk kegiatan atau program yang dijalankan; dan (3) tujuan/target SDGs yang relevan. Kerangka ini digunakan secara konsisten pada Bab IV untuk menyusun matriks pemetaan kontribusi di Kabupaten Garut.

BAB III Gambaran Umum Kabupaten Garut

Ilustrasi 2. Karakteristik wilayah Kabupaten Garut (ilustrasi orisinal)

3.1 Konteks Wilayah dan Arah Pembangunan

Kabupaten Garut merupakan daerah dengan karakteristik topografi pegunungan, memiliki potensi besar pada sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata alam. Visi pembangunan daerah menekankan pada perwujudan pemerataan pembangunan yang berkeadilan, kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Untuk periode pembangunan berikutnya, arah kebijakan daerah juga menekankan pemerataan kualitas infrastruktur, percepatan pembangunan kawasan perdesaan, penataan kawasan perkotaan, serta kelestarian pemanfaatan sumber daya alam berbasis daya dukung dan penanggulangan bencana. Selain itu, penyusunan dokumen induk kawasan seperti masterplan Indikasi Arahan Deliniasi (IAD) 2025–2045 diarahkan untuk mendukung tata ruang berbasis agro yang ditopang ekowisata dan perhutanan sosial, sekaligus memperkuat kolaborasi multipihak dalam pengelolaan sumber daya wilayah.

3.2 Kerangka Regulasi Pendukung Kolaborasi

Salah satu perkembangan penting yang relevan dengan pemetaan kontribusi non-pemerintah adalah terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Regulasi ini menegaskan bahwa TJSLP merupakan kewajiban perusahaan yang harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya setempat, serta mengatur kelembagaan koordinasi pelaksanaannya di tingkat daerah. Keberadaan regulasi ini membuka peluang bagi penyusunan basis data kontribusi perusahaan yang lebih terstruktur, yang dapat diperluas untuk mencakup aktor non-pemerintah lain.

3.3 Posisi Garut dalam Konteks SDGs Jawa Barat

Pada level provinsi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyusun Voluntary Local Review (VLR) SDGs tahun 2023 sebagai laporan evaluasi kemajuan pencapaian SDGs, yang disusun bersama para

pemangku kepentingan pembangunan Jawa Barat. Sebagai salah satu kabupaten di Jawa Barat, capaian dan tantangan pembangunan Kabupaten Garut turut menjadi bagian dari potret regional tersebut, sehingga hasil pemetaan pada kajian ini juga dapat memperkaya data dukung bagi pelaporan serupa di tingkat kabupaten pada masa mendatang.

BAB IV Hasil Pemetaan Kontribusi Aktor Non-Pemerintah

Ilustrasi 3. Ekosistem multipihak dalam pencapaian SDGs di tingkat daerah (ilustrasi orisinal)

4.1 Komunitas dan Kelompok Masyarakat

Berdasarkan penelusuran pustaka, inisiatif berbasis komunitas di berbagai daerah termasuk yang berpotensi diterapkan di Garut umumnya berfokus pada pengelolaan sampah berbasis bank sampah, produksi ecobrick, serta kelompok peduli lingkungan yang mendukung ekonomi sirkular di tingkat desa. Pola-pola ini relevan diterapkan pada kawasan perdesaan Garut yang memiliki potensi pertanian dan pariwisata, sebagai bentuk penguatan kapasitas adaptif masyarakat terhadap isu lingkungan.

4.2 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO)

Salah satu temuan pustaka yang relevan adalah keberadaan organisasi Serikat Petani Pasundan yang melakukan pemetaan lahan garapan di Kabupaten Garut menggunakan sistem informasi geografis, sebagai bentuk advokasi kepastian hukum dan pengelolaan lahan pertanian. Inisiatif semacam ini berkontribusi terhadap upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan yang menjadi salah satu fokus SDGs.

4.3 Perusahaan (Program CSR/TJSLP)

Studi pustaka menemukan beberapa contoh konkret kontribusi sektor swasta di Kabupaten Garut, di antaranya pemanfaatan dana CSR oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, program pemberdayaan ekonomi melalui budidaya domba Garut oleh salah satu perusahaan energi di kawasan Kamojang, serta program tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan panas bumi di Kecamatan Pasirwangi yang turut memengaruhi citra dan hubungan perusahaan dengan warga sekitar. Selain itu, kalangan legislatif daerah secara aktif mendorong optimalisasi dana CSR dari perusahaan BUMN, BUMD, maupun swasta untuk turut membantu penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Garut.

4.4 Universitas dan Akademisi

Kontribusi akademik yang teridentifikasi antara lain penelitian penerapan sistem informasi geografis untuk pemetaan jembatan dan infrastruktur oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan dinas terkait di Kabupaten Garut, serta pengembangan sistem pemetaan data terpadu kesejahteraan sosial yang bertujuan memudahkan verifikasi status kepesertaan warga dalam program bantuan sosial. Selain itu, berbagai perguruan tinggi di Indonesia turut mengembangkan pusat kajian keberlanjutan (SDGs center) yang dapat menjadi rujukan model kelembagaan serupa untuk mendukung kajian SDGs berbasis wilayah, termasuk di Garut.

4.5 Masyarakat Umum

Partisipasi masyarakat umum ditemukan dalam bentuk keterlibatan pada forum musyawarah perencanaan desa, pelibatan warga dalam survei kepuasan terhadap layanan publik berbasis teknologi informasi, serta pemanfaatan aplikasi partisipatif untuk pelaporan kondisi infrastruktur dan lingkungan yang dikembangkan bersama akademisi maupun pemerintah daerah.

4.6 Matriks Pemetaan Kontribusi terhadap SDGs

Tabel berikut merangkum hasil pemetaan awal keterkaitan antara jenis aktor non-pemerintah, bentuk kontribusi, dan target SDGs yang relevan berdasarkan temuan studi pustaka.

Aktor Non-Pemerintah	Contoh Bentuk Kontribusi	Target SDGs Relevan
Komunitas / Kelompok Masyarakat	Bank sampah, ecobrick, kelompok tani, kelompok peduli lingkungan, gerakan konservasi mata air	SDG 6, 11, 12, 13, 15
LSM / Organisasi Non-Pemerintah	Advokasi lahan garapan petani, pendampingan desa, mitigasi bencana berbasis masyarakat	SDG 1, 2, 10, 11, 16
Perusahaan (CSR/TJSLP)	Penyediaan air bersih, sanitasi, ternak domba Garut, revitalisasi rumah tidak layak huni	SDG 1, 3, 6, 8, 12
Universitas / Akademisi	Kajian pemetaan spasial, KKN tematik, pusat kajian keberlanjutan, riset kebijakan daerah	SDG 4, 9, 11, 17
Masyarakat Umum	Partisipasi forum musyawarah desa, gotong royong, pelaporan warga berbasis aplikasi	SDG 11, 16, 17

Tabel 1. Matriks pemetaan awal kontribusi aktor non-pemerintah terhadap SDGs di Kabupaten Garut

BAB V Analisis: Peluang, Tantangan, dan Rekomendasi

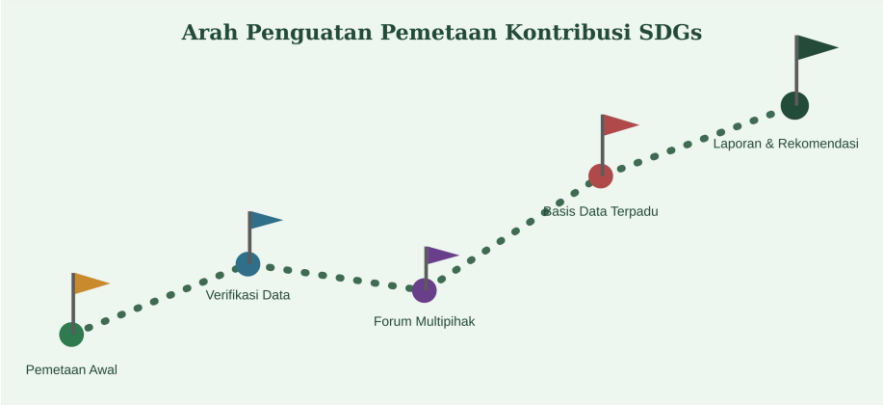

Ilustrasi 4. Alur penguatan pemetaan kontribusi SDGs ke depan (ilustrasi orisinal)

5.1 Peluang dan Tantangan

Peluang	Tantangan
Dukungan regulasi daerah (Perda No. 11/2025) yang mengatur TJSLP secara lebih terstruktur	Data kontribusi non-pemerintah masih tersebar dan belum terdokumentasi secara terpadu
Beragamnya aktor non-pemerintah yang sudah aktif menjalankan program berbasis SDGs	Belum ada forum CSR daerah yang berjalan optimal untuk koordinasi lintas aktor
Adanya model pusat kajian SDGs di berbagai perguruan tinggi yang dapat direplikasi	Keterkaitan program dengan target SDGs secara eksplisit belum banyak diungkapkan oleh pelaksana program
Momentum penyusunan masterplan IAD Garut 2025–2045 yang menekankan kolaborasi multipihak	Keterbatasan data spasial dan validasi lapangan pada sejumlah kajian akademik terdahulu

5.2 Rekomendasi

1. Menyusun basis data terpadu (satu data) kontribusi aktor non-pemerintah yang terhubung dengan indikator SDGs tingkat kabupaten, sebagai kelanjutan dari pemetaan awal dalam kajian ini.
2. Mengoptimalkan forum koordinasi CSR/TJSLP daerah sebagai wadah sinkronisasi program perusahaan dengan prioritas pembangunan daerah dan target SDGs.
3. Mendorong kerja sama pemerintah daerah dengan perguruan tinggi setempat untuk membentuk unit atau pusat kajian keberlanjutan yang secara rutin memperbarui data pemetaan kontribusi non-pemerintah.
4. Mengintegrasikan hasil pemetaan ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD, IAD, dan laporan pemantauan SDGs) agar kontribusi non-pemerintah dapat diakui secara formal dan dijadikan dasar sinergi program.
5. Melakukan verifikasi lapangan dan penelitian primer lanjutan untuk memperkuat validitas data yang pada kajian ini masih bersumber dari studi pustaka daring.

BAB VI Penutup

Kajian ini menunjukkan bahwa kontribusi aktor non-pemerintah terhadap pencapaian SDGs di Kabupaten Garut telah tumbuh dalam berbagai bentuk, mulai dari inisiatif komunitas berskala kecil hingga program CSR perusahaan dan kajian akademik berskala teknis. Namun demikian, kontribusi tersebut pada umumnya belum terdokumentasi secara sistematis dan belum sepenuhnya terpetakan keterkaitannya dengan kerangka SDGs secara eksplisit.

Sebagai kajian awal berbasis studi pustaka, hasil pemetaan ini bersifat indikatif dan terbuka untuk diperkaya melalui verifikasi lapangan, wawancara pemangku kepentingan, maupun forum diskusi terarah bersama komunitas, LSM, perusahaan, universitas, dan masyarakat di Kabupaten Garut. Dengan basis data yang lebih terpadu, pemetaan kontribusi non-pemerintah dapat menjadi instrumen penting bagi penguatan tata kelola pembangunan berkelanjutan di tingkat kabupaten.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut. (2021). Kabupaten Garut Dalam Angka 2021.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Mengenal SDGs dan Peran BPK dalam Pengawasan Pencapaian SDGs. Diakses dari bpk.go.id.

Capah, B. M., Rachim, H. A., & Raharjo, S. T. Implementasi SDG's-12 melalui Pengembangan Komunitas dalam Program CSR. Jurnal SHARE Social Work Journal, Universitas Padjadjaran.

Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ITS. Diakses dari its.ac.id.

Pemerintah Kabupaten Garut. (2025). Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Pemerintah Kabupaten Garut. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut 2019–2024 dan 2025–2029. Diakses dari garutkab.go.id.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2023). Voluntary Local Review (VLR) SDGs Provinsi Jawa Barat 2023.

Public Information Center Kabupaten Garut. Diseminasi Draft Akhir Dokumen Indikasi Arahan Deliniasi (IAD) Kabupaten Garut 2025–2045. Diakses dari pic.garutkab.go.id.

Pusat Kajian SDGs Universitas Padjadjaran. Menyongsong SDGs: Kesiapan Daerah-Daerah di Indonesia.

SDGs Center Universitas Lambung Mangkurat. Kolaborasi CSR dalam Percepatan Pencapaian SDGs. Diakses dari sdgs.ulm.ac.id.

Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIIK), Universitas Brawijaya. Sistem Informasi Geografis Pemetaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Garut.

ResearchGate. Sistem Informasi Geografis Pemetaan Lahan Garapan Serikat Petani Pasundan Kabupaten Garut.

Antara News Jabar. Pemberitaan mengenai pemanfaatan CSR untuk pasokan air bersih dan dorongan optimalisasi dana CSR di Kabupaten Garut.

Universitas Gadjah Mada. Program CSR Indonesia Power Unit Kamojang: Studi Kasus Ternak Domba Garut di Kampung Pelag, Garut, Jawa Barat.

Universitas Pendidikan Indonesia. Pengaruh Program Corporate Social Responsibility Chevron Geothermal Indonesia Ltd terhadap Citra Perusahaan (Survei di Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut).